

TIM KEMENDAGRI ASISTENSI PERCEPATAN REALISASI APBD DI PAPUA BARAT DAYA



google.com

Tim dari Kementerian Dalam Negeri turut serta dalam upaya meningkatkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Papua Barat Daya, sebuah wilayah yang masih mengalami rendahnya pencapaian dalam hal Pendapatan dan Belanja APBD jika dibandingkan secara nasional. Sebelum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-17, tim tersebut melakukan kunjungan ke Provinsi Papua Barat Daya untuk melakukan pemantauan dan memberikan bantuan dalam percepatan realisasi APBD. Rapat Koordinasi digelar di Hotel Vega Prime, Sorong, Papua Barat Daya, bertujuan untuk memfasilitasi penyusunan perubahan APBD untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah tersebut untuk tahun anggaran 2023.

Menurut Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, per 11 Agustus 2023 realisasi Pendapatan APBD untuk Papua Barat Daya hanya mencapai 35,39 persen di bawah rata-rata nasional yang mencapai 47,95 persen dan menempati peringkat keempat terendah secara nasional. Sementara itu, realisasi Belanja APBD juga di bawah rata-rata nasional, hanya mencapai 29,51 persen. Agus Fatoni menekankan pentingnya optimalisasi realisasi APBD untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Dia juga mengingatkan bahwa APBD perlu direvisi dan dievaluasi secara berkala agar sesuai dengan kebutuhan dan target yang telah ditetapkan.

Sementara itu, dalam menyusun APBD tahun anggaran 2024 Agus Fatoni menguraikan lima kebijakan pokok sebagai panduan bagi pemerintahan daerah, yaitu kebijakan umum, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan

kebijakan surplus, serta defisit dan SILPA. Kegiatan monitoring dan asistensi ini dihadiri oleh berbagai pejabat dari Kementerian Dalam Negeri serta para kepala daerah dan SKPD di Provinsi Papua Barat Daya. Ini menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah dan memastikan alokasi anggaran yang efektif dan efisien untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Sumber Berita:

Harian Tempo, “Tim Kemendagri Asistensi Percepatan Realisasi APBD di Papua Barat Daya”, tanggal 23 Agustus 2023.

Catatan:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, pada Pasal 5 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk: a) mengelola belanja secara efektif, efisien, dan fokus terhadap capaian target pelayanan publik; b) mengutamakan penggunaan alokasi anggaran melalui rasionalisasi belanja daerah yang belum menjadi prioritas guna meningkatkan kualitas keluaran belanja daerah; dan c) mengalokasikan anggaran yang memadai guna percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.